

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pendapatan dari pajak menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini akan menjadi salah satu kesempatan pemerintah untuk menciptakan segala potensi yang ada sebagai sumber pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan nasional sehingga laba yang dihasilkan setiap perusahaan akan mengalami peningkatan yang berdampak pada kenaikan pajak yang harus dibayar. Namun ketaatan pembayaran pajak masih sulit untuk ditaati karena wajib pajak sering menganggap bahwa pajak adalah sebuah beban yang akan mengurangi laba mereka sehingga wajib pajak cenderung melakukan perlawanan pajak untuk meminimalkan pajak yang akan dibayar.

Salah satu perlawanan pajak yang biasa dilakukan oleh wajib pajak adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau yang biasa disebut dengan *tax avoidance* merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak melalui suatu transaksi yang tidak mempunyai substansi tujuan bisnis. Pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda terkait pembayaran pajak. Pemerintah cenderung memaksimalkan pendapatan pajak sedangkan wajib pajak cenderung meminimalkan pembayaran pajak. Karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak maka menyebabkan timbulnya tindakan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk di atasi. Hal ini karena, dengan adanya praktik penghindaran pajak maka akan mengurangi pendapatan negara. Penghindaran pajak dapat terjadi karena kurangnya pengawasan pemerintah sehingga adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Berikut ini adalah beberapa fenomena mengenai *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan:

Tabel 1.1 Fenomena mengenai *Tax Avoidance* yang terjadi pada perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Fenomena
1.	PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA)	Perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013 dan tahun 2015 dimana Bentoel mengambil pinjaman di tahun 2013 dan tahun 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Atas pinjaman itu, Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun (US\$ 164 juta). Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Kedua, melalui pembayaran untuk royalti, ongkos, dan biaya IT dimana Bentoel melakukan pembayaran kepada perusahaan berafiliasi di Inggris. Dengan adanya perjanjian Indonesia-Inggris maka pajak atas pembayaran tersebut mendapat pengurangan pajak yang berarti pajak yang dikenakan terhadap transaksi tersebut menjadi lebih kecil [1].
2.	PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU)	PT Toba Pulp Lestari melakukan penghindaran pajak selama tahun 2007-2016. Penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara memanipulasi dokumen ekspor dimana Toba Pulp melaporkan ekspor bahan baku bubur kertas jenis Bleached Hardwood Kraft Pulp (BHKP) kepada DP Macao. Tetapi, barang yang diekspor adalah bahan baku bubur kertas jenis Dissolving Wood (DW). Harga bubur kertas jenis BHKP yang lebih rendah dibandingkan bubur kertas jenis DW menyebabkan keuntungan yang dilaporkan Toba Pulp jauh lebih rendah daripada yang seharusnya. Akibatnya, Toba Pulp membayar pajak yang lebih rendah daripada yang seharusnya karena penjualan yang dilaporkan ke pemerintah adalah bubur kertas jenis BHKP bukan bubur kertas jenis DW [2].
3.	PT Adaro Energy Tbk (ADRO)	PT Adaro Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang besar di Indonesia melakukan penghindaran pajak selama tahun 2009-2017. PT Adaro Energy melakukan penghindaran pajak dengan cara menjual batu baranya ke anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International yang berada di Singapura dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah. Sehingga Adaro bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia [3].

Berdasarkan tabel 1.1 di atas beberapa perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memperkecil laba mereka agar beban pajaknya menjadi lebih rendah.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Kinerja keuangan dapat diukur dengan *return on assets*, yaitu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan aset yang dimiliki. Laba perusahaan yang meningkat akan diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan menata kinerja keuangannya terutama *return on assets* dengan sebaik mungkin agar dapat memaksimalkan laba perusahaan. Kinerja keuangan yang baik dapat meminimalisasi tindakan *tax avoidance* karena adanya aset yang memadai untuk membayar pengeluaran (biaya) perusahaan, seperti pembayaran pajak. Hal ini dapat menggambarkan bahwa baik buruknya kinerja keuangan akan mempengaruhi tingkat agresif perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* [4]. Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [5].

Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* melalui kinerja keuangan yaitu terdiri dari Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Likuiditas.

Faktor pertama yang mempengaruhi *tax avoidance* melalui kinerja keuangan adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak atau lembaga eksternal perusahaan. Karena adanya tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang saham, maka pemilik institusional akan memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja keuangannya. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan [4]. Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan [6].

Banyaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan menunjukkan pengawasan yang semakin ketat oleh pihak eksternal perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa dengan adanya pengawasan dari pemilik institusional maka perusahaan akan lebih sulit untuk melakukan *tax avoidance*. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* [7]. Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [4]. Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik institusional akan mendorong manajemen untuk menciptakan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang baik menggambarkan perusahaan memiliki kondisi keuangan yang baik. Sehingga dengan kinerja keuangan yang baik akan meminimalkan perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* karena perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* melalui kinerja keuangan adalah ukuran perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan ke dalam beberapa kelompok, diantaranya adalah perusahaan besar, perusahaan sedang, ataupun perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung memperoleh laba yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar memiliki pasar yang lebih luas sehingga memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan [4]. Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan [8] [9] [10]. Umumnya perusahaan besar lebih diperhatikan oleh para investor sehingga manajemen perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola perusahaannya terutama untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* [4]. Namun penelitian lainnya juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [7] [11]. Ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki pasar yang lebih luas sehingga dapat memperoleh penjualan yang lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan meningkatnya kinerja keuangan, maka perusahaan besar akan lebih diminati dan

diperhatikan oleh para investor sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* melalui kinerja keuangan adalah *leverage*. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan besarnya modal eksternal yang dipakai untuk kebutuhan biaya operasional perusahaan. Dari sudut pandang manajemen keuangan, rasio *leverage* sangat penting dalam pengukuran risiko finansial. Rasio *leverage* yang tinggi akan menimbulkan risiko gagal bayar yang cukup tinggi pula. Jumlah utang yang besar akan diikuti dengan beban bunga yang harus dibayar juga semakin tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan karena dengan beban bunga yang tinggi akan mengakibatkan laba perusahaan semakin berkurang. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan [9] [10]. Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan [12]. Rendahnya laba perusahaan akan diikuti dengan rendahnya beban pajak yang harus dibayar. Dalam hal ini, perusahaan bisa saja memanfaatkan utang sebagai salah satu tindakan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [7]. Penelitian lainnya juga menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [5] [13]. Tingkat *leverage* yang tinggi akan berdampak buruk pada kinerja keuangan karena besarnya beban bunga yang harus dibayar. Kinerja keuangan yang buruk mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* guna meminimalkan pembayaran pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi *tax avoidance* melalui kinerja keuangan adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah rasio yang menggambarkan selisih dari penjualan periode berjalan dengan penjualan periode sebelumnya. Naik turunnya pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi kemampuan untuk mempertahankan laba perusahaan sehingga akan berpengaruh pada kinerja keuangan pula. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan [10]. Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan [14]. Pertumbuhan penjualan yang tinggi akan meningkatkan laba sehingga perusahaan memiliki kecukupan modal kerja untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran perusahaan. Hal ini dapat meminimalisasi tindakan *tax avoidance* karena adanya kecukupan modal kerja untuk membayar pajak. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* [15]. Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [16]. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan meningkatkan laba sehingga kinerja keuangan juga semakin meningkat. Kinerja keuangan yang meningkat dapat menggambarkan perusahaan memiliki kondisi keuangan yang lebih baik sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan tindakan *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* melalui kinerja keuangan adalah likuiditas. Likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas mempunyai hubungan yang cukup erat dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi rasio likuiditas menandakan bahwa semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menggambarkan bahwa mereka memiliki kinerja keuangan yang baik. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan [17]. Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan [8]. Perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas kemungkinan sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini karena perusahaan cenderung lebih memilih menggunakan dana yang ada untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya daripada membayar pajak yang terlalu tinggi sehingga perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Dalam penelitian sebelumnya menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* [18]. Namun hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* [19]. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan dalam kondisi buruk sehingga memungkinkan terjadinya tindakan *tax avoidance* untuk mengurangi pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan hasil penelitian (*Research Gap*) yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor

Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
4. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?
5. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi masalah pada ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Variabel Endogen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel Eksogen dalam penelitian ini terdiri dari 5 variabel yakni:
 - a. Kepemilikan Institusional
 - b. Ukuran Perusahaan
 - c. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - d. Pertumbuhan Penjualan

- e. Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)
3. Variabel Mediasi dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA).
4. Objek pengamatan pada penelitian ini adalah Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Periode pengamatan penelitian ini adalah periode 2016 sampai dengan 2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan ruang lingkup maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* melalui Kinerja Keuangan pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Manajemen Perusahaan
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi manajemen sebagai informasi tambahan, acuan, ataupun pembanding dalam meningkatkan kinerja

keuangan perusahaan dan memberikan informasi mengenai batasan-batasan rasio keuangan yang baik sehingga dapat terhindar dari tindakan *tax avoidance*.

2. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor dan calon investor mengenai kinerja keuangan dan tindakan-tindakan penghindaran pajak perusahaan sehingga investor dapat lebih cermat dalam menilai kondisi perusahaan dan dapat lebih mempertimbangkan keputusannya dalam melakukan investasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang seberapa besar potensi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan pengembangan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai *tax avoidance*.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014” [4].

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel Eksogen

Penelitian terdahulu menggunakan variabel eksogen Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini ditambahkan variabel *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Likuiditas. Alasan peneliti menambahkan variabel adalah sebagai berikut:

a. *Leverage*

Leverage yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini karena tingkat DER yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan telah agresif dalam pembiayaan perusahaan dengan utang

sehingga dapat mengakibatkan volatilitas laba sebagai akibat dari beban bunga tambahan. Tindakan ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk tujuan perpajakan guna memperkecil beban pajak mereka [20].

b. Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan yang rendah, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang kecil pula [21]. Pendapatan perusahaan yang kecil dapat mengakibatkan menurunnya kondisi keuangan sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik *tax avoidance* untuk meminimalkan pengeluaran perusahaan seperti pembayaran pajak.

c. Likuiditas

Likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga memiliki kemungkinan untuk melakukan praktik *tax avoidance* guna meminimalkan pembayaran pajak [22].

2. Objek Pengamatan

Objek pengamatan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan objek pengamatan pada penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Periode Pengamatan

Periode pengamatan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2011-2014. Sedangkan periode pengamatan pada penelitian ini adalah tahun 2016-2019.